

PERAN BALITBANGDA PROVINSI PAPUA BARAT DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN SPESIFIK LOKASI DI PAPUA BARAT

Charly D Heatubun, Ezrom Batorinding, Hendrik Burwos

*Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat*

PENDAHULUAN

World Development Reeport (WDR) terbaru yang dikeluarkan Bank Dunia, menyatakan bahwa investasi pada sektor pertanian merupakan cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan negara-negara berkembang. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar dalam penciptaan kesempatan kerja dan jaminan pendapatan kepada masyarakat, namun ketidakseimbangan sistemik masih sering terjadi pada kelompok masyarakat tani yang sebagian besar berada di pedesaan (Malik 2015, hlm 22).

Akibat ketidakseimbangan ini sebagai penyebab hadirnya kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan saat ini bukan saja secara ekonomi tetapi sudah menjadi kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan struktural terbentuk karena struktur lingkungan (tidak memiliki kesempatan yang sama) dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan penduduk miskin bisa naik kelas.

Kemiskinan di Papua Barat dideskripsikan dengan data jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan. Penduduk miskin Provinsi Papua Barat (September) tahun 2016 berjumlah 24,88 persen mengalami sedikit penurunan sebesar 0,85 persen dibandingkan dengan (September) tahun 2015 yaitu 25,73 persen. Meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, namun persentase penduduk miskin Papua Barat masih berada pada peringkat kedua kemiskinan di Indonesia.

Pada Maret 2016, Garis Kemiskinan Perkotaan sebesar Rp 487.722,- (garis kemiskinan tertinggi keenam dari 34 provinsi). Sementara itu, Garis Kemiskinan pedesaan Papua Barat sebesar Rp 466.996,- (garis kemiskinan tertinggi keenam dari 34 provinsi). Baik garis kemiskinan perkotaan maupun pedesaan, keduanya cukup tinggi dan melebihi garis kemiskinan nasional. Hal ini menunjukkan secara rata-rata biaya yang dibutuhkan setiap penduduk Provinsi Papua Barat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya per bulan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain (BPS, 2017).

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat merupakan yang terkecil kedua di Indonesia, setelah Provinsi Kalimantan Utara (0,26 persen). Tercatat hanya 0,35 persen penduduk Indonesia yang berada di Provinsi Papua Barat pada tahun 2016. Namun bila dilihat dari Capaian IPM, Provinsi Papua Barat adalah 62,21 pada tahun 2016, bertumbuh 0,77 lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan IPM tahun 2015 sebesar 0,75 pesen dengan IPM 61,73. Walaupun terjadi pertumbuhan tetapi Status capaian IPM tersebut masih tetap sama, dengan kategori "Sedang" berbeda jauh dengan Provinsi Kalimantan Utara dengan IPM

mencapai 69,20 dengan selisih IPM 6,99. Kondisi IPM kedua provinsi ini berbeda dengan capaian IPM Nasional tahun 2016 yang sudah berada pada kategori tinggi dengan capaian IPM 70,18.

PDRB Papua Barat tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga Rp 7 miliar dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Rp 62,889 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) dengan nilai Rp 54,711 triliun. Peningkatan PDRB ADHB bukan karena adanya peningkatan produksi pada sektor-sektor ekonomi tetapi adanya pengaruh inflasi yang masuk dalam perhitungan PDRB. berbeda dengan ADHK, PDRB mencerminkan adanya kenaikan produksi yang menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp 2,4 triliun. Peranan sub sektor migas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Papua Barat.

Bila struktur ekonomi dilihat tanpa memperhitungkan subsektor migas, maka sektor pertanian berkontribusi terbesar kedua setelah sektor Konstruksi (25,57%) dengan kontribusi 18,82 persen, selanjutnya kontribusi ketiga Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,08 persen) dan keempat sektor industri pengolahan dengan kontribusi 4,56 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tanpa migas mencapai 10,99 persen menurun dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 13,79 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat dengan sektor migas meningkat menjadi 4,52 persen di tahun 2016 bila dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 (4,10 persen). Khusus sektor pertanian laju pertumbuhan melambat di tahun 2016 dengan laju 2,10 persen dibandingkan tahun 2015 (2,14 persen).

Pada tingkat Nasional, Sektor Pertanian dalam Rencana Strategis 2015-2019 mengacu pada paradigma pertanian untuk Pembangunan yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yaitu sebagai tumpuan ketahanan pangan yang tidak hanya untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsional untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lainnya). Dengan prioritas NAWA CITA untuk mewujudkan kedaulatan pangan

Sektor pertanian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari status Papua Barat sebagai provinsi miskin. Pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting karena sekitar 60% masyarakat Papua Barat hidup dan menguasai sumberdaya hayati. Akan tetapi, sejauh ini kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil dibanding sektor pertambangan dan migas.

Dalam sejarah dunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam membangun.

Dukungan pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas dalam visi misi Gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2017 – 2022, Visi: “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat” dengan misi keenam: membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Misi ini sejalan dengan program NAWA CITA untuk mendukung kedaulatan pangan.

Tercapainya kedaulatan pangan tidak terlepas dari program kerja yang tepat sasaran dan tepat guna serta didukung dengan indikator yang tepat. Keunggulan absolut (komparatif dan kompetitif) daerah sebagai data awal dalam mengatur strategi pembangunan pertanian menuju kedaulatan pangan. Ketika telah diketahuinya suatu daerah dengan potensi atau produk unggulannya juga isu strategis dalam upaya pengembangannya maka program kerja dengan tepat dapat dirancang untuk pengembangan daerah tersebut berdasarkan keunggulannya.

Posisi Balitbangda Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang besar baik pertanian, perikanan, pertambangan hasil hutan maupun pariwisata, namun potensi yang besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan Papua Barat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan landasan hukum pembentukan BALITBANGDA Provinsi Papua Barat yang terbentuk dan aktif pada januari 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal ini memberikan arti bahwa kelitbangan sudah seharusnya mendapatkan fungsi dan peran yang luas dalam mencapai target dan sasaran pembangunan di daerah, terutama dalam menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya.

Lebih lanjut kelitbangan daerah juga memberikan keleluasaan dalam melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah, fasilitasi dan inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota.

BALITBANGDA adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi sektor ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan sebagai analisator dan interrogator dalam merumuskan grand strategy pembangunan yang mempunyai *Output policy*

recommendation dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemantapan penataan ruang dalam pembangunan daerah, pengembangan budaya daerah, pengembangan pemanfaatan teknologi dan penataan ekonomi serta keuangan daerah, diperlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang didasari hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan sehingga dapat berjalan searah, konvergensi dan saling mengisi.

Fungsi dan tugas kelitbangan Provinsi yang cukup besar sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 pasal 27 huruf (a) sampai dengan huruf (m) maka fungsi koordinasi kelitbangan antar lembaga penelitian dan antar tingkatan Provinsi dengan kabupaten/kota menjadi sangat penting guna menjangkau isu-isu strategis penelitian paling mengemuka yang perlu mendapatkan solusi pemecahan melalui kegiatan kelitbangan untuk menunjang pembangunan daerah.

Tugas Pokok BALITBANGDA Papua Barat (berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No.7 Tahun 2016) adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan penjabaran fungsi:

1. Penyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi;
2. Penyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Provinsi;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Provinsi;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi.
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Provinsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Peran Balitbangda Provinsi Papua Barat

Beberapa permasalahan pokok penyebab masih rendahnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, diantaranya: (i) program pembangunan yang berbasis pada pemanfaatan sektor tersebut di Papua Barat belum terarah/fokus komoditas, berkesinambungan dan menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah; (ii) perencanaan dan implementasi program sektor pertanian dalam arti luas belum dilakukan secara sinergi dan terintegrasi antar instansi terkait di Papua Barat; (iii) alokasi sumberdaya modal dan anggaran diarahkan pada beragam komoditas tanpa mempertimbangkan tingkat keunggulan dan aspek multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi sektor lain; dan (iv) pengembangan pertanian dalam arti luas di Papua Barat belum berorientasi pasar skala besar.

Di sisi lain dukungan pembiayaan pembangunan melalui APBD, APBN dan Otsus cukup memadai. Sementara itu, terkait dengan tingginya kekayaan keanekaragaman sumberdaya hayati, ekosistem, dan kekhasan budaya (*kearifan lokal*) yang dimiliki, maka Papua Barat berproses untuk menetapkan diri sebagai provinsi konservasi (*provinsi pembangunan berkelanjutan*). Fakta ini mengharuskan penerapan prinsip konservasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua Barat agar pemanfaatan sumberdaya dapat dilakukan secara berkelanjutan (*lestari*).

Keseluruhan fakta diatas menuntut perlunya re-orientasi paradigma pembangunan terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pertanian dalam arti luas (pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) di Papua Barat. Untuk ini, sangat diperlukan adanya percepatan pembangunan melalui pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki, berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan syarat harus memperhatikan aspek kelestariannya agar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara berkelanjutan.

Tantangan pembangunan 2017-2022 yaitu mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan dengan mengoptimalkan dan membangun basis keunggulan daerah serta memperkuat keterkaitan antar desa/kampung dan antar kecamatan/distrik. Perubahan mendasar (transformasi) dengan mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan secara berjenjang, meliputi meningkatkan kinerja (jangkauan dan mutu) pelayanan publik, meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak dasar, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta membangun kerjasama dan kemitraan yang solid.

Dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan serta isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Papua Barat maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan semestinya akan menjadi sangat penting dan strategis terutama pada sektor Pertanian.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan dan implementasi pembangunan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah perlunya dukungan data dan informasi. Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian (BTP) Papua Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, sudah saatnya untuk berperan dan bersinergi dengan BALITBANGDA Provinsi Papua Barat dan berbagai institusi penelitian dan pengembangan sebagai sumber penyedia berbagai rekomendasi kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai penyeleggara pembangunan.

Peran BALITBANGDA Provinsi Papua Barat dalam mendukung pengembangan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi sebagai bagian pelaksanaan fungsi kelitbangan yaitu fungsi koordinasi dan fasilitasi yang mendukung pembangunan pertanian yang mandiri dan berdaulat menuju kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal terkait fungsi BALITBANGDA adalah:

1. Koordinasi pelaksanaan kajian, penelitian dan pengembangan inovasi spesifik lokasi di Pemerintah Provinsi;
2. Koordinasi pelaksanaan kajian kebijakan lingkup pengembangan inovasi spesifik lokasi di Provinsi Papua Barat;
3. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah terkait pengembangan inovasi spesifik lokasi;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi spesifik lokasi yang difasilitasi BALITBANGDA.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan terkait pengembangan inovasi spesifik lokasi.

Dengan melihat peran dan fungsi strategis yang dimainkan Balitbangda maka diharapkan hasil-hasil kajian, penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan berbagai kebijakan strategis secara khusus terkait inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Papua dengan menurunkan angka kemiskinan di Papua Barat.

Fokus Komoditas Unggulan Papua Barat

Berdasarkan komoditas-komoditas unggulan daerah di setiap kabupaten/kota sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dipilih beberapa komoditas yang menjadi fokus provinsi.

Komoditas unggulan fokus provinsi di bagi berdasarkan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sebagai berikut :

1. Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura komoditas ubi-ubian: Wondama, Manokwari Selatan, Bintuni, Manokwari, Fakfak, Raja Ampat, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Pegunungan Arfak

2. Sub sektor perkebunan komoditas kakao dan sagu: Wondama, Manokwari Selatan, Bintuni, Fakfak, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Kabupaten Sorong, Kaimana dan Manokwari
3. Sub sektor peternakan komoditas sapi dan babi : Wondama, Manokwari Selatan, Bintuni, Fakfak, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Kabupaten Sorong, Kaimana, Manokwari, Kota Sorong dan Pegunungan Arfak
4. Sub sektor kehutanan komoditas kayu merbau dan kayu matoa: Wondama, Manokwari Selatan, Bintuni, Fakfak, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Kabupaten Sorong dan Kaimana
5. Sub sektor perikanan komoditas cakalang dan kakap: Wondama, Manokwari Selatan, Bintuni, Manokwari, Raja Ampat, Tambrau, Kota Sorong dan Kaimana

Semua komoditas yang terpetakan memiliki tingkat keunggulan komparatif. Di mana seluruh komoditas unggulan di Papua Barat menunjukkan keunggulan dari sisi sumberdaya alam (ketersediaan lahan dan potensi produksi). Sementara aspek lainnya masih kurang atau masih menunjukkan skala nilai yang rendah. Beberapa komoditas unggulan tertentu dari masing-masing subsektor telah cukup menonjol pada aspek lainnya tidak hanya pada skala ruang kabupaten tetapi unggul dalam kawasan regional Papua Barat.

Pada sub sektor tanaman pangan: Sagu mulai terintegrasi dengan industri pengolahan sehingga mendapat dukungan inovasi teknologi dan pasar. Pada sub sektor perkebunan: tanaman pala selain dukungan sumber daya lahan tersedia yang luas, telah memiliki aspek manajerial yang cukup, memiliki pasar dalam skala luas, dan dukungan inovasi teknologi cukup tersedia; Kakao memiliki ketersediaan inovasi teknologi, dukungan pasar yang luas, namun produksi menurun/stagnan dan perlu direhabilitasi.

Pada subsektor perikanan: tuna, cakalang, dan udang memiliki potensi produksi yang besar, mulai diantar pulauan dalam skala produksi yang masih kecil. Pada subsektor peternakan: Sapi didukung oleh ketersediaan sumberdaya lahan pengembalaan yang cukup luas, dukungan inovasi teknologi cukup tersedia, ketersediaan pasar cukup luas. Pada subsektor kehutanan: Potensi kehutanan dan hasil hutan masih mengandalkan ekstraksi alam, dukungan inovasi teknologi masih rendah. Komoditas unggulan lainnya masih memenuhi kebutuhan lokal wilayah pada skala Kabupaten/kota di Papua Barat.

REFERENSI:

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2017. Inventarisasi dan Identifikasi Komoditas Unggulan Daerah di Provinsi Papua Barat. (Laporan Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2017-2022. Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

- Badan Pusat Statistik, 2016. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2017. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2017. Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016. Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2016. Jakarta.
- Universitas Papua dan Bank Indonesia, 2014. Komoditi, Produk dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Papua Barat. Laporan Hasil Penelitian kerjasama Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat dengan Universitas Papua Tahun 2014.